

Identifikasi strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan indikator pencetusnya (Studi kasus: Desa Sosok, Tayan)

Identification of slum development strategies based on its triggering indicators (Case study: Desa Sosok, Tayan)

Nana Novita Pratiwi^{1*}, Mira Sophia Lubis¹, Ely Nurhidayati¹, Agustiah Wulandari¹, dan Vita Elysia²

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

²Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

*Corresponding author's email: nananovita@teknik.untan.ac.id

Abstrak. Desa Sosok memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan citra kawasan di Kota Tayan dengan perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Namun, keberadaan permukiman kumuh seluas 14,7 ha memerlukan penanganan untuk mencegah perburukkan citra kawasan. Kajian ini bertujuan menghasilkan strategi peningkatan kualitas permukiman di kawasan kumuh Desa Sosok berdasarkan indikator pencetus yang didasarkan pada aspek-aspek kualitas lingkungan permukiman. Analisis *skoring* digunakan untuk melihat tipologi kekumuhan, dilanjutkan dengan analisis deskriptif kualitatif untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas. Temuan menunjukkan tipologi kekumuhan Desa Sosok tergolong ringan dengan status lahan legal dan prioritas tinggi. Dengan demikian, strategi peningkatan kualitas lingkungan kumuh dapat menerapkan konsep pemugaran dengan memprioritaskan indikator yang berpengaruh kuat yang menjadi pemicu. Adapun indikator kekumuhan yang berpengaruh kuat dalam menciptakan kekumuhan Desa Sosok adalah drainase, limbah dan persampahan. Maka, prioritas penanganan kumuh diutamakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan disesuaikan dengan permasalahan pada setiap indikator kumuh.

Kata Kunci: Lingkungan permukiman; Strategi peningkatan; Tipologi kawasan kumuh

Abstract. Sosok Village has had a strong influence in shaping the image of Tayan City with significant developments over time. However, the existence of slumcovering an area of 14.7 hectares requires intervention as prevention strategy to prevent its deteriorating. This study aimed to produce strategies of quality improvement in the slum area of Sosok Village based on the triggering indicators based on aspects of the quality of the settlement. Scoring analysis was used to identify the typology of slums, followed by qualitative descriptive analysis to formulate quality improvement strategies. The findings showed that the typology of slums in Sosok Village is relatively light with legal land status and high priority. Thus, strategies of restoration condered to be suitable for improving the quality of slum environments by prioritizing indicators that have a strong influence as triggers. The indicators of slums that have a strong influence in creating slums in Sosok Village are drainage, waste, and rubbish. So, the priority for slums intervention is to overcome this problem, and adjusted to the problems indicated in each slum area.

Keywords: Development strategy; Settlements; Typology of slums

1. Pendahuluan

Masalah permukiman kumuh perkotaan merupakan isu utama yang terus berulang dan menjadi polemik [1]. Hal ini menyiratkan kegagalan pemerintah dalam upaya penanganan permukiman kumuh [2]. Salah satu yang mempengaruhi sulitnya penanganan kumuh di Indonesia adalah minimnya data dan informasi terkait dengan kondisi kekumuhan baik secara kualitas maupun kuantitas [3]. Permukiman kumuh menjadi masalah yang komprehensif karena selain berhubungan langsung dengan aspek sosial ekonomi, namun juga berkaitan dengan aspek politik dalam proses pembentuknya [4,5]. Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan karena kepadatan dan ketidakteraturan bangunan, buruknya kualitas perumahan serta PSU yang tidak memenuhi standar [6,7].

Menurut Direktur Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2023, masih terdapat sebesar 55.000 ha kawasan kumuh pada tahun 2020 yang tersebar di Indonesia, di mana saat ini capaian pengentasan Kawasan kumuh periode 2020-2023 adalah sebesar 32.000 ha dari 38.000 ha target yang akan diselesaikan [8]. Dengan demikian, kekumuhan masih merupakan masalah pelik yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Pada tahun 2014, proporsi Kawasan kumuh Indonesia yang ada di perkotaan dan perdesaan adalah 60% : 40%. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa permukiman kumuh perkotaan memiliki proporsi paling besar dibandingkan kawasan perdesaan [9]. Salah satu Provinsi yang masih menyisakan kawasan kumuh hingga saat ini adalah Provinsi Kalimantan Barat. Hingga tahun 2020, Kalimantan Barat masih memiliki kawasan kumuh sebesar 112,4 ha, di mana 68 ha atau 60% merupakan lokasi *squatter* dan permukiman yang sangat padat sementara sisanya merupakan kawasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut [10]. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dengan persebaran kawasan kumuh yang cukup tinggi [11].

Berdasarkan SK Bupati Sanggau No.309/DPCKTRP Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Sanggau Tahun 2021, terdapat 21 kawasan yang masuk dalam permukiman kumuh. Di antara seluruh kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Sanggau, Kota Tayan merupakan salah satu kawasan kumuh yang menjadi prioritas penanganan dengan luas total sebesar 40,92 ha [11]. Dari seluruh Kota Tayan, Desa Sosok merupakan lokasi kewenangan Provinsi yang menjadi prioritas penanganan dengan luas sebesar 14,7 ha atau sebesar 36% dari luas total keseluruhan. Kondisi tersebut disebabkan adanya tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat sasaran dan berskala kota serta berbasis Kawasan [12].

Belum adanya strategi penanganan dan penahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota, kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh [13], karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota [14]. Selain itu, belum terpenuhinya kemampuan pemerintah daerah dalam kapasitas SDM dan pembiayaan, serta belum terakomodasinya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan perekonomian yang berkelanjutan (*livelihood*) di permukiman kumuh [15,16]. Maka dari itu diperlukannya penanganan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut [7,17].

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yaitu pendekatan dengan membawa teori kelengkapan terkait dengan mengukur tingkat kekumuhan dan melihat tipologi kekumuhan dalam merumuskan pola penanganan kumuh yang telah dituangkan dalam Permen PU mengenai Permukiman Kumuh [18]. Pendekatan deduktif harus dilengkapi dengan instrumen yang jelas sebelum memasuki lapangan [19]. Adapun variabel sebagai muatan instrumen terdiri dari tiga pertimbangan yaitu aspek kekumuhan antara lain kondisi bangunan dan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan limbah, persampahan dan proteksi kebakaran; aspek legalitas tanah; serta aspek pertimbangan lain.

Analisis dilakukan dengan dua teknik, yakni pembobotan dan deskriptif kualitatif. Analisis pembobotan dilakukan untuk melihat tipologi dan karakter kumuh dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan *skoring*: Penilaian lokasi kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mengacu pada Permen PU tentang Permukiman kumuh [18]. Penentuan skor aspek kekumuhan menggunakan skala ordinal, yakni skor 5 jika parameter pada lokasi kajian memiliki indikasi kekumuhan >75%, skor 3 jika parameter pada lokasi kajian memiliki indikasi kekumuhan 51-75%, skor 1 jika parameter pada lokasi kajian memiliki indikasi kekumuhan 25-50%, dan skor 0 jika parameter pada lokasi kajian memiliki indikasi kekumuhan <25%. Pada aspek legalitas tanah menggunakan skala nominal, yaitu

bersertifikat (+) dan tidak bersertifikat (-). Sedangkan aspek pertimbangan lain menggunakan skala ordinal, yakni skor 1 jika lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara; skor 3 jika satu atau dua dari potensi sosial, ekonomi dan budaya rendah untuk dikembangkan atau dipelihara; skor 5 jika lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara.

- b. Mengklasifikasikan kawasan permukiman kumuh: Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian sesuai pedoman kumuh, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi [18]:

Tabel 1. Klasifikasi kekumuhan.

Aspek	Parameter Skor	Klasifikasi
Apek Kekumuhan	Skor 71-95	Kumuh Berat
	Skor 45-70	Kumuh Sedang
	Skor 19-44	Kumuh Ringan
Aspek Legalitas Tanah	+	Status tanah legal
	-	Status tanah tidak legal
Pertimbangan Lain	Skor 11-15	Prioritas Tinggi
	Skor 6-10	Prioritas Sedang
	Skor 1-5	Prioritas rendah

Sementara analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk merumuskan strategi penanganan kawasan kumuh berdasarkan pencetusnya.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Kekumuhan Desa Sosok


Gambaran kekumuhan Desa Sosok dinilai berdasarkan kriteria kumuh yang terdiri dari kondisi gedung bangunan, jalan lingkungan, air bersih untuk minum, kondisi saluran drainase, pengelolaan limbah, sampah dan proteksi kebakaran [20,21]. Selain itu, kriteria lain sebagai parameter upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah status lahan dan pertimbangan lain seperti nilai strategis lahan, kependudukan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya (Tabel 1) [22].

Tabel 1. Gambaran kekumuhan Desa Sosok.

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
Gedung Bangunan	a. Memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona (khusus kawasan tepian sungai harus menghadap Sungai dengan jalan titian)	a. Bangunan di tepian sungai ada yang berorientasi membelakangi Sungai (tidak memiliki jalan titian) sehingga dapat memberikan dampak dibuangnya limbah di Sungai	
	b. Memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	b. Bangunan di tepian sungai tidak memiliki keteraturan terhadap blok lingkungan dan kavling, meliputi pengaturan bentuk blok dan jalan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. KDB dilokasi kajian 60-80 dengan KLB (1-1,5) % (masih sesuai dengan standart RDTR).	
	<ul style="list-style-type: none"> - KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL (>80%) - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL (>1,5) - Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi yaitu: kota sedang 	Meskipun demikian, kepadatan bangunan dilokasi kajian tergolong cukup, yaitu 200 unit/Ha. Pada umumnya bangunan rumah tepian sungai, merupakan kawasan yang tidak memperhatikan jarak antar bangunan (0 m), sehingga hal tersebut	

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
	dan kota kecil >200 unit/Ha	dapat menurunkan kualitas lingkungan.	
c.	Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan: 1. Konstruksi bangunan tidak aman (non permanen) 2. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan tergolong rendah (bangunan tidak berjarak, standart rumah sehat tidak terpenuhi)	c. Kondisinya: 1. Keberadaan bangunan khususnya di tepi sungai dan di atas sungai memiliki konstruksi rumah kayu yang diantara kondisinya sudah tidak layak huni dan menyebabkan rendahnya keselamatan bangunan gedung (bangunan tidak aman) 2. Kondisi bangunan yang hampir tidak memiliki jarak antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya dan yang berdempetan antar bangunan menyebabkan ketidaknyamanan (kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan) dan mengurangi nilai kesehatan bangunan (sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung).	 

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan memiliki permukaan jalan yang baik pada lokasi perumahan atau permukiman	Seluruh kawasan telah terlayani cakupan jalan lingkungan dengan sebagian memiliki kualitas permukaan jalan yang mengalami kerusakan Jalan lingkungan diantaranya masih memiliki lebar 1,5-2 meter	
Air Bersih Untuk Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa dengan kebutuhan minimal air untuk minum adalah 60 lt/org/hr.	Seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih, dimana untuk kawasan permukiman didaratan telah terlayani jaringan PDAM, sedangkan di tepian sungai masyarakat menggunakan air hujan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Dalam memperoleh air baku masyarakat masih menggunakan sistem penampungan PAH (pemanenan air hujan) untuk menampung air hujan secara individual, diantaranya ada yang menggunakan tangki air plastik dan tempayan semen	
Saluran Drainase	Terjadinya genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Lokasi yang terjadi genangan berada di bantaran sungai pada perbatasan antara Dusun Tabat dan Dusun Barage. Genangan dilokasi kajian umumnya diatas 30 cm dengan durasi genangan 1-2 jam. Hal tersebut terjadi jika musim	

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
		<p>penghujan tinggi (dalam setahun 1 kali).</p> <p>Pada lokasi jalan lingkungan di lokasi kawasan permukiman kumuh masih belum tersedia saluran drainase lingkungan (saluran tersier dan/atau saluran lokal) baik di kedua sisi jalan maupun di salah satu sisi jalan, melainkan drainase hanya terdapat di jalan utama.</p>	
	<p>Tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal</p> <p>Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman yang tidak terpelihara.</p>	<p>Saluran drainase yang terdapat di jalan utama memiliki kondisi yang kurang terawat, seperti terjadi penutupan saluran oleh semak belukar dan mengalami penangkalan saluran.</p>	
	<p>Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan .</p>	<p>Kondisi konstruksi drainase pada lokasi diantaranya masih berupa tanah dan untuk konstruksi berupa beton juga di beberapa lokasi telah mengalami kerusakan.</p>	
		<p>Terdapat kondisi drainase yang mengalami penyumbatan oleh endapan lumpur dan semak belukar, hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya dan berkurangan volume air yang dapat dialiri.</p>	

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
Pengelolaan Limbah	<p>Kondisi limbah harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik 2. Tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<p>Kondisi limbah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum menggunakan kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik, khususnya bangunan di tepian Sungai. Diantaranya terdapat bantuan stimultan pembangunan jamban/MCK dari pemerintah kepada masyarakat setempat 2. Masyarakat yang telah menggunakan sistem pengolahan limbah setempat berupa tangki septik hanya terdapat di wilayah daratan, namun khususnya di tepian sungai bangunannya tidak memiliki sistem pengolahan limbah, melainkan langsung dibuang ke sungai 	
Persampahan	<p>Syarat teknis prasarana dan sarana persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala 	<p>Kondisi persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas masyarakat tepian air tidak memiliki sarana persampahan dimana sampah dibuang ditempat sampah. Sementara rumah didaratan mengelola sampah dengan cara dibakar dan ditimbun. Hanya 15% masyarakat yang membuang sampah 	

Aspek	Kriteria	Kondisi	Gambar
	lingkungan (ada Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan dan Tempat pengolahan sampah terpadu)	langsung ke TPS setelah sampah dikumpulkan didepan rumah (frekuensi 3-5 hari sekali). 2. Lokasi TPS berada cukup jauh dari kawasan permukiman. Pada lokasi masih belum terlayani sarana pengelolaan sampah meliputi gerobak sampah atau truk sampah dan TPST skala lingkungan	
Proteksi Kebakaran	Prasarana yang ada: - Pasokan air - Jalan lingkungan - Sarana komunikasi - Data sistem proteksi kebakaran lingkungan - Bangunan pos kebakaran Sarana yang ada: - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) - Mobil pompa - Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan - Peralatan pendukung lainnya	Sebagian kawasan terakses sumber air dan juga dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran Sebagian bangunan terlayani oleh pemadam kebakaran	

Karakteristik kekumuhan Desa Sosok yang digambarkan pada tabel 1 selanjutnya dilakukan *skoring* untuk melihat tipologi tingkat kekumuhan. Berdasarkan potensi desa dan SK Kumuh Kabupaten Sanggau, Kekumuhan Desa Sosok memiliki luas 14,7 ha dengan jumlah bangunan 420 unit, jumlah penduduk 2.730 jiwa dan kepala keluarga 546 KK. Mengacu pada aturan kekumuhan, diketahui bahwa tipologi tingkat kekumuhan Desa Sosok yang merepresentasikan Kota Tayan tergolong kumuh ringan dengan tingkat prioritas penanganan tinggi (Tabel 2).

Tabel 2. Tipologi tingkat kekumuhan Desa Sosok.

No	Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Persen (%)	Nilai
A.	Kondisi Kekumuhan					
1.	Gedung Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	89	Unit	21,19%	0
		Kepadatan Bangunan	67	Unit/Ha	0,00%	0
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	24	Unit	5,71%	0
2.	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	m	0,00%	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1.002	m	38,88%	1
3.	Air Bersih Untuk Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	336	Ha	61,54%	0
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	336	m	61,54%	3
4.	Saluran Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1	m	6,80%	0
		Ketidakterediaan Drainase	1.965	m	87,10%	5
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	125	m	12,50%	5
		Tidak Terpeliharanya Drainase	291	KK	100,00%	3
		Kualitas Konstruksi Drainase	291	KK	100,00%	3
5.	Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	141	KK	25,82%	1
		Prasarana Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	141	KK	25,82%	1
6.	Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Sistem Pengelolaan	236	KK	43,22%	1
			30	KK	5,49%	0

No	Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan	Persen (%)	Nilai
		Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis				
		Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	406	KK	74,36%	3
7.	Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	196	KK	46,67%	1
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	86	KK	20,48%	0
Total Nilai						27
Tingkat Kekumuhan						Kumuh Ringan
B.	Legalitas Lahan					
1.	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Sebesar 96,43% atau sebanyak 405 bangunan hunian dari total 420 bangunan hunian memiliki SHM/HGB/ Surat yang Diakui Pemerintah			(-)
		Kesesuaian RTR	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sanggau			(+)
C.	Pertimbangan Lain					
1.	Non Fisik	Nilai Strategis Lokasi	Berada di lokasi yang startegis bagi Kota Tayan			3
		Kependudukan	186 Jiwa/Ha			3
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Lokasi memiliki embrio penguatan ekonomi terutama di sepanjang sungai			3
Total Nilai						9
Keterangan Prioritas						Tinggi

Kumuh ringan dengan prioritas tinggi mengindikasikan bahwa urgensi penanganan perbaikan kualitas lingkungan permukiman dapat dilaksanakan dengan memprioritaskan komponen pengikat yang paling tinggi mempengaruhi kekumuhan [23]. Indikator kuat yang mempengaruhi kekumuhan Desa Sosok di antaranya adalah air bersih, drainase dan persampahan. Air bersih menggambarkan ketersediaan air minum yang mempengaruhi kesehatan masyarakat [24]. Semakin baik kualitas dan kuantitas air bersih, maka semakin sehat masyarakat yang akan mempengaruhi kelayakan lingkungan permukiman. Selanjutnya drainase yang mempengaruhi kelancaran buangan air hujan [25]. Semakin baik kualitas drainase, maka peluang terjadinya banjir yang akan mempengaruhi kualitas permukiman akan lebih rendah. Kemudian adalah persampahan yang mempengaruhi kebersihan lingkungan

permukiman [26]. Semakin baik pengelolaan sampah dengan didukung oleh sarana dan prasarana persampahan yang baik, maka semakin rendah potensi kekumuhan di suatu wilayah.

3.2. Peningkatan kualitas permukiman kumuh

Tipologi tingkat kekumuhan, legalitas lahan serta pertimbangan lain merupakan pertimbangan dalam menentukan pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh serta penetapan perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan tingkat kekumuhan dan permukiman kumuh di kawasan Desa Sosok termasuk ke dalam kondisi kumuh ringan, dengan legalitas tanah sebagian besar adalah hak milik dan sewa dan lahan yang sesuai dengan tata ruang. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh sesuai dengan skema umum perumusan konsep dan strategis pencegahan dan peningkatan kualitas yakni melalui konsep utama pemugaran, yaitu upaya perbaikan kawasan permukiman agar menjadi layak huni [18]. Adapun upaya yang dilakukan disesuaikan dengan permasalahan kekumuhan Desa Sosok (Tabel 3, Gambar 1, dan Gambar 2).

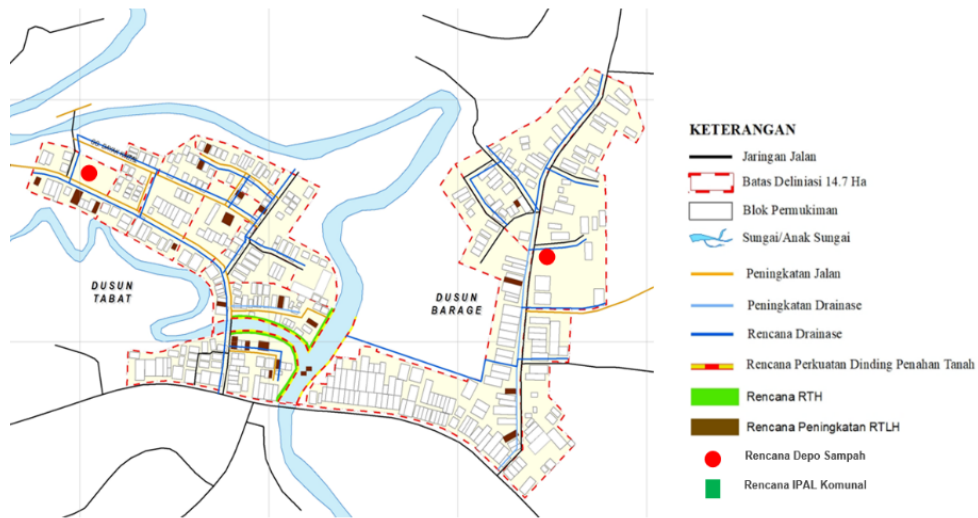
Tabel 3. Upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman Desa Sosok.

Aspek	Permasalahan	Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Outcome
Gedung Bangunan	Sebanyak 89 unit dari 420 unit bangunan hunian atau sebesar 21,19% tidak memiliki keteraturan	<ol style="list-style-type: none"> Penegakan aturan pembangunan permukiman terhadap kesesuaian perizinan dan aturan sempadan Sungai Sosialisasi dan edukasi terkait lingkungan sehat dan aturan teknis kawasan sempadan sungai Menata dan relokasi permukiman yang melanggar garis sempadan, terutama bangunan yang berada di atas air Pengembangan jalan inspeksi atau promenade sebagai pengaman sempadan Sungai Untuk rumah yang berada di lahan pasang surut sungai, rumah disyaratkan untuk menghadap Sungai Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman di daerah bantaran sungai 	Masyarakat mengerti dan memahami pentingnya pola bermukim yang sesuai dengan aturan bangunan dan lingkungan. Pemahaman masyarakat mengenai pola bermukim yang baik akan mempermudah program perbaikan gedung khususnya dalam penataan rumah disempadan

Aspek	Permasalahan	Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Outcome
			Sungai (menghadap Sungai dengan jalan titian)
	Sebanyak 67 unit dengan luas kawasan 14,70 Ha sehingga memiliki kepadatan bangunan 67 unit/Ha	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengembangkan lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur b. Optimalisasi kepadatan bangunan dengan pengendalian dan pengaturan jarak bangunan 	Masyarakat mendapatkan lingkungan yang tertata dan teratur
	Sebanyak 24 unit dari 420 unit bangunan hunian atau sebesar 5,71% tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat. b. Bantuan langsung stimulan perbaikan rumah tidak layak huni 	Masyarakat mampu mengakses rumah yang layak huni dan sehat
Jalan Lingkungan	Terdapat jalan lingkungan sepanjang 1.002 meter atau sebesar 38,88% yang permukaan jalannya telah mengalami kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas jaringan jalan sesuai peruntukan, kelas dan standar teknis (jalan dilengkapi dengan saluran drainase dan PJU) b. Perbaikan perkerasan jalan lingkungan dengan peningkatan kualitas paving blok, beton, dan aspal 	Masyarakat mampu mengakses infrastruktur yang layak dan aman sesuai dengan persyaratan teknis
Air Bersih Untuk Minum	Sebanyak 336 KK dari 546 KK atau sebesar 61,54% belum terlayani sarana air minum yang layak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan sistem pengolahan <i>water harvesting</i> yang aman konsumsi b. Mengoptimalkan penyediaan akses dan layanan jaringan air minum dengan peningkatan jaringan pipa pada setiap unit bangunan 	Masyarakat terlayani dengan ketersediaan sarana air bersih
	Sebanyak 336 KK dari 546 KK atau sebesar 61,54% belum terpenuhinya kebutuhan minimal air minum sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan sistem pemanenan air hujan secara komunal b. Peningkatan sistem cakupan pelayanan air minum perpipaan PDAM dan non PDAM 	
	Seluas 1 Ha atau sebesar	a. Pembuatan turap yang	Terawatnya

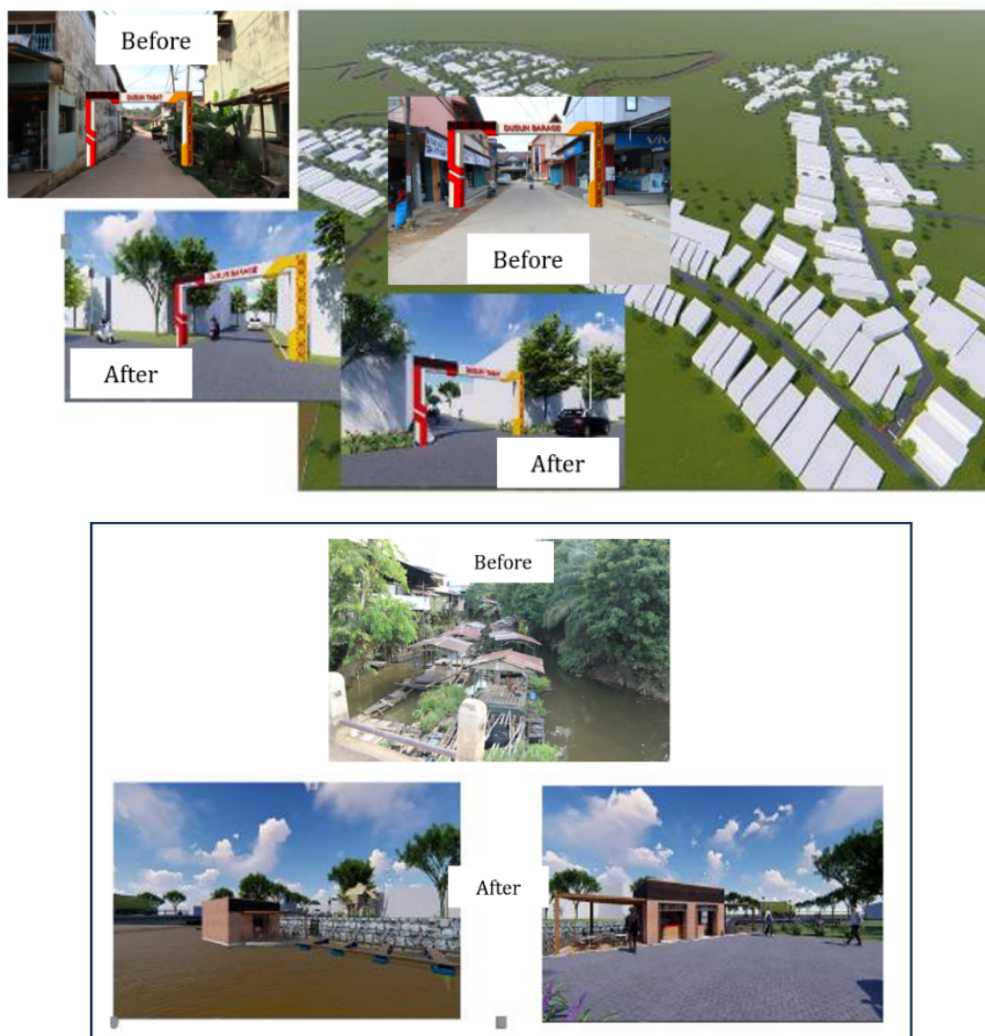
Aspek	Permasalahan	Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Outcome
Saluran Drainase	6,80% pada kawasan rawan terjadi genangan air	bermanfaat mengantisipasi terjadinya genangan di wilayah tersebut b. Normalisasi saluran drainase	saluran drainase untuk menghindari terjadinya genangan
	Kekurangan saluran drainase sepanjang 1.965 meter dari kebutuhan drainase 2.256 meter atau sebesar 87,10% yang belum tersedia saluran drainase lingkungan	Pembuatan saluran drainase yang terhubung dengan saluran di dalam Kawasan	Terciptanya lingkungan yang bebas banjir
	Seluruh panjang drainase pada lokasi yaitu 291 m atau sebesar 100% memiliki drainase dengan kondisi tidak terawat	Memperbaiki kondisi drainase lingkungan yang kotor dan berbau dengan Pemeliharaan dan perawatan Jaringan drainase lingkungan secara rutin dan berkala	Terciptanya masyarakat yang berdaya untuk hidup sehat
Limbah	Sebanyak 141 KK dari 546 KK atau sebesar 25,82% memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah domestik pada tingkat kawasan. b. Meningkatkan penggunaan tangki septik berspesifikasi aman oleh rumah tangga c. Memberi bantuan pengadaan tangki septik d. Menyediakan sistem pengolahan air limbah kawasan (IPAL komunal)	Terciptanya lingkungan sungai yang bersih
	Sebanyak 141 KK dari 546 KK atau sebesar 25,82% memiliki prasarana sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	a. Mengoptimalkan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik pada tingkat kawasan b. Perbaikan dan Peremajaan sarana prasarana air limbah dengan peningkatan sarana prasarana air limbah yang memenuhi persyaratan teknis dan aman oleh rumah tangga	
Persampahan	Sebanyak 236 KK dari 546 KK atau sebesar 43,22% memiliki prasarana dan	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewardahan	Meningkatkan cakupan pelayanan

Aspek	Permasalahan	Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Outcome
	sarana persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	dan pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R	infrastruktur persampahan melalui peningkatan infrastruktur pewardahan dan pengangkutan sampah baik secara konvensional maupun 3R
	Sebanyak 30 KK dari 546 KK atau sebesar 5,49% memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pengurangan timbulan sampah melalui upaya Program 3R di masyarakat yang diawali dengan meningkatkan pembangunan pengelolaan sampah berbasis masyarakat/lembaga di tingkat desa secara bertahap	
	Sebanyak 406 KK dari 546 KK atau sebesar 74,36% memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Sosialisasi pengelolaan persampahan dengan metode 3R	
Proteksi Kebakaran	Sebanyak 196 unit bangunan dari 420 unit bangunan hunian atau sebesar 46,67% belum tersedia prasarana proteksi kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki prasarana proteksi kebakaran Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman padat untuk sistem proteksi kebakaran dan keadaan darurat lainnya melalui peningkatan jalan, sumber air 	Dengan adanya sarana dan prasarana proteksi kebakaran maka diharapkan lokasi dapat terlayani proteksi kebakaran dengan baik
	Sebanyak 86 unit bangunan dari 420 unit bangunan hunian atau sebesar 20,48% belum tersedia sarana proteksi kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi pentingnya memiliki sarana proteksi kebakaran Meningkatkan pelayanan terhadap proteksi kebakaran pada kawasan permukiman secara menyeluruh (APAR/Hidran) 	



Gambar 1. Siteplan peningkatan kualitas lingkungan permukiman Desa Sosok.





Gambar 2. Ilustrasi peningkatan kualitas lingkungan permukiman Desa Sosok.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Desa Sosok sebagai kawasan yang merepresentasikan Kota Tayan merupakan kawasan dengan tipologi kekumuhan ringan dengan prioritas tinggi. Artinya bahwa, penanganan kekumuhan dapat dilakukan dengan memprioritaskan parameter kumuh yang melekat kuat dan mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman Desa Sosok. Adapun parameter kumuh yang melekat kuat mempengaruhi kekumuhan Desa Sosok adalah drainase, limbah dan persampahan. Namun demikian, seluruh indikator kumuh masih memberikan kontribusi kekumuhan seperti keberadaan rumah tidak layak huni dan kepadatan bangunan, kondisi jalan yang masih buruk di beberapa titik, terdapat beberapa rumah tangga yang tidak terlayani air bersih yang layak, serta minimnya sarana dan prasarana kebakaran.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni pemugaran dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa upaya

pemugaran yang dilakukan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh Desa Sosok antara lain peningkatan dan konektivitas saluran drainase, penyediaan IPAL komunal, penyediaan depo sampah, peningkatan jalan, peningkatan rumah tidak layak huni, penyediaan RTH disempadan sungai, serta penguatan dinding sungai. Dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh diperlukan adanya kolaborasi dan kontribusi peran dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun komunitas sadar lingkungan. Dengan demikian, penuntasan kawasan Kumuh Desa Sosok akan lebih cepat efektif.

Referensi

- [1] Koterisa J, Mononimbar WJ, Lahamendu V. Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan. *Spasial* 2018;5:276–84.
- [2] Arief AS, Redin H, Amelia V. Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganan Kawasan Permukiman Murjani Bawah di Kota Palangka Raya. *Journal of Environment and Management* 2021;2:71–81. <https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2661>.
- [3] Mutaqin Z, Persada C, Suroso E. Prioritas Penentuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh yang Berkelanjutan. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan* 2019;16:65. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v16i2.65-75>.
- [4] Pratama IA. Pemetaan Tingkat Resiko Kekumuhan di Lingkungan Juring Leneng Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram* 2015;1:27–32.
- [5] Ervianto WI, Felasari S. Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran* 2019;7:178–86.
- [6] Dwiputri M, Hamdani N, Alam BP. Analisis Tingkat Kekumuhan Pada Lokasi Permukiman Di Perkotaan. *Jurnal Arsitektur (LAKAR)* 2020;3:80–7.
- [7] Tangkudung TH, Tilaar S, Sela RLE. Studi Penentuan Tingkat Kekumuhan dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *SPASIAL* 2021;8:468–77.
- [8] Kementerian PUPR. Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas 6.872 Hektar Permukiman Kumuh di Indonesia 2023.
- [9] Wihadanto A, Barus B, Achsani NA, Bratakusumah DS. Analisis Karakteristik dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman ‘Kampung Braga’-Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 2017;1:132–44.
- [10] Oxtora R. Percepat Penuntasan Kawasan Kumuh, Kalbar-Kementerian PUPR kolaborasi. Antara 2019.
- [11] Bappeda. Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Sanggau 2022.
- [12] Sagung Alit W. AA, Jihan JC. Tingkat Kekumuhan dan Analisis Spasial Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus : Surabaya Timur). *Waktu: Jurnal Teknik UNIPA* 2018;16:47–55. <https://doi.org/10.36456/waktu.v16i02.1667>.

- [13] Wulan NDN, Widodo AP. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2020;1:84–98. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i2.24>.
- [14] Wiarni S, Mononimbar W, Supardjo S. Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. *Spasial* 2018;5:61–70.
- [15] Pratiwi SA, Pratiwi NN, Puryanti V. Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Parit Nenas Kelurahan Siantan Hulu. *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang* 2018;5.
- [16] Sari DP, Alhamdani MR. Arahan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Keraton Pakunegara Tayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *TATALOKA* 2020;22:586–604. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.586-604>.
- [17] Crysta EA, Budisusanto Y. Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya Pada Lokasi Permukiman (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya). *Geoid* 2018;13:109. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v13i2.3681>.
- [18] Kementerian PUPR. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, MPU Dan PRRI 1 2018.
- [19] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. 26th ed. Bandung: Alfabeta; 2017.
- [20] Sekatia A. Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang Studi Kasus Partisipasi Masyarakat. *Modul* 2015;15:57–66.
- [21] Nurhidayati E, Safriadi N, Dzulqarnain F. Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Tepian Air Kota Singkawang. *UNIPLAN: Journal of Urban and Regional Planning* 2021;2:29. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v2i1.45895>.
- [22] Setiawan LA, Astuti W, Rini EF. Tingkat Kualitas Permukiman (Studi Kasus: Permukiman Sekitar Tambang Galian C Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 2017;12:1. <https://doi.org/10.20961/region.v12i1.15922>.
- [23] Kusuma RP, Rahmawati D. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS* 2020;8. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.46525>.
- [24] Aguspriyanti CD, Nimita F, Deviana D. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development* 2020;1:176. <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>.
- [25] Taji AB. Identifikasi Spasial Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Syntax Idea* 2021;3:2038. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i9.1459>.
- [26] Karisoh SD, Tondobala L, Syafriny R. Pengaruh Kekumuhan terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Perkampungan Kota Manado. *SPASIAL* 2020;7:62–9.